

Hampir 10 Tahun Digunakan, Jembatan Biru Puma di Baubau Kini Butuh Perbaikan Serius



Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Kondisi Jembatan Biru yang menghubungkan kawasan Puma, Pulau Makasar, dengan daratan Kota Baubau, semakin memprihatinkan setelah hampir satu dekade digunakan masyarakat. Kerusakan pada sejumlah bagian jembatan, termasuk tiang penyangga dan besi pembatas, membuat warga meminta Pemerintah Kota Baubau segera melakukan pemeriksaan teknis dan perbaikan.

Jembatan yang diresmikan pada 5 Juli 2017 pada masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam itu telah menjadi akses utama masyarakat Puma

menuju pusat Kota Baubau. Kendati persmian dilakukan pada 2017, warga disebut telah memanfaatkannya sejak 2016 karena jalur tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan menggunakan transportasi laut.

Bagi masyarakat Pulau Makasar, keberadaan jembatan tersebut telah mengubah pola mobilitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi. Sebelum jembatan dibangun, warga Puma harus mengandalkan perahu jonson maupun katinting untuk menuju daratan Baubau. Kini, hampir setiap hari jembatan dilintasi mobil pikap, angkutan umum, dan kendaraan pribadi.

Lanjut ke Hal: 7

BUPATI ADIOS PIMPIN UPACARA HUT RI, SERUKAN KERJA NYATA UNTUK BUTON SELATAN MAJU

72 PASKIBRAKA SUKSES KIBARKAN MERAH PUTIH

- BUPATI ADIOS PIMPIN UPACARA HUT KE-81 RI
- 72 PASKIBRAKA SUKSES KIBARKAN MERAH PUTIH
- PENYERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA UNTUK ASN BERDEDIKASI
- UPACARA DIHADIRI TNI, POLRI, ASN, PELAJAR DAN MASYARAKAT
- SERUKAN KERJA NYATA UNTUK BUTON SELATAN MAJU

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 81TH

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2026

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Bupati Buton Selatan (Busel) Muhammad Adios mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat pengabdian dan kerja nyata bagi daerah. Pesan itu disampaikan Adios saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Lakarada, Batauga, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, TNI-Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Sebanyak 72 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Busel menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih setelah menjalani latihan intensif selama kurang lebih satu bulan.

Kekhidmatan upacara juga ditopang oleh susunan petugas yang melibatkan unsur TNI-Polri dan pelajar. Komandan upacara dijabat Kapten Inf. I Dewa Komang Hadi

Lanjut ke Hal: 7

Rapat Paripurna HUT RI, Walikota Baubau H Yusran Tekankan Pembangunan Tepat Mutu dan Sasaran, Ajak DPRD Kawal Pembangunan dan Simak Pidato Kenegaraan Presiden



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP - Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah. Hal itu disam-

Lanjut ke Hal: 7

Wali Kota H Yusran Fahim Luncurkan Bantuan Pangan Untuk 14.850 KPM Yang Disalurkan Bulog Baubau Berupa Beras Sebanyak 445,5 Ton Tiga Bulan Sekaligus



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Sebanyak 14.850 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Baubau mendapat bantuan pangan berupa 445,5 ton beras untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan. Perum Bulog Cabang Baubau menyalurkan bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, dan Septem-

ber 2026 sekaligus atau one shot, Selasa (18/8/2026).

Setiap keluarga menerima 30 kilogram beras yang merupakan akumulasi bantuan tiga bulan, masing-masing 10 kilogram per bulan. Penyaluran tersebut diluncurkan di Kota Baubau dan dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, Bulog,

kepala OPD, camat, serta lurah. Pemerintah menilai bantuan itu penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim meminta distribusi bantuan dilakukan secara tertib dan dapat

Lanjut ke Hal: 7

Semangat Kemerdekaan Membara di Lakudo, Bupati Buton Tengah buAzhari Puji Kreativitas Peserta

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH” Semangat kemerdekaan mengemuka dalam Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia

Lanjut ke Hal: 7



Bupati Adios Pimpin Upacara HUT RI, Serukan Kerja Nyata untuk Buton Selatan Maju, 72 Paskibraka Sukses Kibarkan Merah Putih

Santoso, Wadanyon TP 871/Lamaindo, sedangkan Komandan Paskibraka dipercayakan kepada Bripka Saiful Marica Jai, PS. Pamin 1 Yon B Satbrimob Polda Sultra.

Dari kalangan pelajar, La Ode Hidayah Sari Arsy dari SMAN 4 Sampolawa dipercayakan sebagai pembentang bendera dan La Ode Divan Fajrilla dari sekolah yang sama sebagai pengerek bendera. Komandan Pasukan 17 dijabat La Ode Noval Ramadani dari SMAN 4 Sampolawa, sedangkan Komandan Pasukan 45 dipercayakan kepada Arel dari SMAN 2 Batauga.

Pasukan pengapit terdiri atas Sertu La Ruslin dan Serda Muammar yang merupakan Babinsa Ramil 07/Batauga Dim 1413/Buton, Koramil 1413-07/Batauga. Mereka didukung Bripda Anton dari Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Sultra serta Bharada Ady Kurniawan dari Kompi 1 Batalyon B

Pelopor Satbrimob Sultra.

Setelah upacara, Adios menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Penganugerahan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/TK/Tahun 2026. Secara historis, Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang memenuhi masa kerja tertentu serta menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan.

Adios menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat

upacara yang telah menjalankan tugas dengan aman, lancar, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga kepada Paskibraka, TNI-Polri, ASN, serta seluruh masyarakat yang telah mengikuti upacara dengan penuh khidmat,” ujar Adios.

Ia menegaskan, makna kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. “Semangat peringatan kemerdekaan harus diwujudkan melalui pengabdian dan kerja nyata dalam membangun Kabupaten Buton Selatan,” katanya.

Peringatan di Lakarada itu menjadi bagian dari tradisi nasional yang berakar pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut menandai perwujudan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme dan pendudukan Jepang. Dalam perjalanan berikutnya, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1950 sebagai negara anggota ke-60.*)

bahkan menyebut pengoperasian jembatan tersebut berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan penurunan biaya logistik. Secara internasional, Golden Gate Bridge di San Francisco telah melayani lalu lintas kendaraan sejak 28 Mei 1937 dan terus menjadi contoh pentingnya pengelolaan infrastruktur jembatan dalam jangka panjang.

Masyarakat Puma dan sekitarnya berharap Pemkab Baubau tidak menunggu kerusakan semakin parah sebelum mengambil tindakan. Pemeriksaan teknis dinilai perlu segera dilakukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan bentuk penanganan yang tepat, mengingat Jembatan Biru bukan sekadar jalur penghubung, melainkan akses vital bagi mobilitas, kegiatan ekonomi, serta pelayanan masyarakat Pulau Makasar.*)

yarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Untuk penataan kawasan permukiman dan ruang terbuka hijau (RTH), pemerintah melanjutkan Penataan Kawasan Lakologou Tahap I serta penataan Kawasan Lembah Hijau.

Program tersebut diharapkan mampu mempercantik wajah kota, menyediakan ruang terbuka hijau yang asri dan menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata.

Di sektor pemenuhan kebutuhan dasar, Pemerintah Kota Baubau juga memprioritaskan penyediaan air bersih melalui pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan jalur khusus.

Program tersebut diarahkan untuk mengatasi persoalan distribusi dan memastikan pasokan air bersih dapat menjangkau kawasan permukiman yang selama ini membutuhkan perhatian.

Sementara pada sektor konektivitas, pemerintah melakukan sejumlah pekerjaan rekonstruksi jalan, di antaranya Jalan Kompleks Lowu-Lowu, Jalan Kompleks Sulaa Tahap II dan Jalan Dr Wahidin.

Menurut Yusran, ketiga ruas tersebut memiliki peran penting sebagai jalur transportasi lokal yang menunjang mobilitas masyarakat, akses menuju fasilitas publik serta kelancaran distribusi ekonomi.

Ia menegaskan, seluruh proyek strategis tersebut merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Baubau agar semakin maju, se-

“Kalau dibiarkan tanpa perbaikan ringan maupun pemugaran, ini bisa membahayakan pengendara dan mengancam keberlangsungan jembatan itu sendiri,” ujarnya. Warga mengaku keluhan mengenai kondisi Jembatan Biru telah beberapa kali disampaikan kepada pihak legislatif dan eksekutif, tetapi hingga Agustus 2026 belum ada kepastian mengenai waktu maupun bentuk penanganannya.

Pentingnya pemeliharaan jembatan bukan hanya menjadi persoalan lokal. Di Indonesia, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura diresmikan pada 10 Juni 2009 dan sejak awal pembangunan dirancang sebagai bagian penting konektivitas serta penggerak perekonomian. Pemerintah

Waborobo. Pembenahan tersebut diharapkan dapat memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pinggiran kota.

“Pembenahan infrastruktur kesehatan ini merupakan langkah krusial untuk mendekatkan serta meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar bagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kota Baubau juga memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tersebar di 43 Kelurahan.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau yang ditargetkan mencapai 80,76 pada akhir 2026.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menempatkan revitalisasi kawasan pasar sebagai salah satu agenda strategis. Penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan pusat perdagangan yang modern, bersih, higienis dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

Selain itu, penataan kawasan Kotamara terus dimaksimalkan sebagai ruang publik yang mendukung interaksi sosial, aktivitas olahraga dan pengembangan ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Penataan kawasan perkotaan tidak semata-mata pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup mas-

Semangat Kemerdekaan Membara di Lakudo, Bupati Buton Tengah buAzhari Puji Kreativitas Peserta

itu mempertemukan pelajar, organisasi kemasyarakatan, aparatatur pemerintah, hingga instansi vertikal dalam satu perhelatan penuh kreativitas dan kekompakan.

Antusiasme peserta mendapat apresiasi langsung dari Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., yang menyaksikan jalannya lomba bersama Wakil Bupati Muh. Adam Basan, S.Sos., Ketua TP-PKK, jajaran DPRD, Plh. Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD. Menurut Azhari, keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan masih menjadi ruang penting untuk memperkuat persatuan.

“Semangat dan kreativitas yang ditampilkan peserta menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Azhari dalam kegiatan tersebut.

Lomba mengambil rute di jalur Poros Lakudo-Wamengkoli, dengan peserta diberangkatkan dari Lapangan Tangkalawa dan menyelesaikan perjalanan di garis finis depan Eks Kantor Bupati Buton Tengah. Sepanjang lintasan, peserta menampilkan formasi barisan, gerakan penghormatan, atraksi kreatif, serta yel-yel bernuansa perjuangan yang menarik perhatian masyarakat.

Peserta berasal dari kalangan pelajar SMA/SMK dan MA, TP-PKK, Karang Taruna, pondok pesantren, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi vertikal. Keberagaman peser-

ta membuat lomba tidak sekadar menjadi kompetisi penampilan, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan nasionalisme. “Kemerdekaan harus diisi dengan kebersamaan, sportivitas, dan semangat untuk terus membangun daerah,” ujar Azhari.

Secara historis, peringatan kemerdekaan Indonesia berakar pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dibacakan Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta. Proklamasi tersebut lahir tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II di kawasan Asia-Pasifik dan menjadi bagian dari gelombang dekolonisasi yang kemudian mengubah peta politik dunia. Indonesia selanjutnya mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomasi dan bersenjata hingga memperoleh pengakuan kedaulatan pada 1949.

Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, semangat tersebut terus diterjemahkan dalam berbagai bentuk di tingkat masyarakat, termasuk kegiatan olahraga dan kebudayaan seperti gerak jalan. Di Lakudo, perayaan itu diwujudkan melalui kreativitas peserta sekaligus pesan persatuan agar momentum HUT RI tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi dorongan untuk menjaga kebersamaan dan mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata.

“Yang terpenting adalah bagaimana semangat kemerdekaan ini terus hidup dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan Buton Tengah,” kata Azhari.*)

Wali Kota H Yusran Fahim Luncurkan Bantuan Pangan Untuk 14.850 KPM Yang Disalurkan Bulog Baubau Berupa Beras Sebanyak 445,5 Ton Tiga Bulan Sekaligus

tanggungjawabkan. Menurut dia, besarnya jumlah beras yang disalurkan harus diikuti jaminan kualitas, kuantitas, serta ketepatan penerima. “Pastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat,” kata Yusran.

Ia menyebut bantuan tersebut memiliki arti tersendiri karena disalurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Baubau berharap beras itu tidak hanya membantu memenuhi konsumsi keluarga, tetapi juga mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian pemerintah.

Dari sisi sejarah, intervensi pemerintah terhadap ketersediaan beras bukan hal baru di Indonesia. Perum Bulog dibentuk pada 1967 sebagai lembaga yang menjalankan fungsi strategis pemerintah dalam pengadaan dan pengelolaan pangan, khususnya beras. Dalam perkembangannya, kebijakan perberasan tidak hanya diarahkan untuk menjaga stok dan harga, tetapi juga digunakan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan bantuan pangan berbasis beras juga merupakan bagian dari praktik yang lebih luas dalam penanganan ketahanan pangan global. Persoalan akses terhadap pangan telah menjadi agenda internasional sejak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui hak setiap orang atas taraf hidup yang layak, termasuk pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) kemudian terus mendorong negara-negara memperkuat ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan.

Kepala Perum Bulog Cabang Baubau, Ritno, mengatakan penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data pemerintah yang telah diverifikasi. Bulog tidak mengubah data tersebut. “Data itu kami terima dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah melakukan verifikasi. Bulog tidak memodifikasi data tersebut,” ujarnya.

Ritno menjelaskan beras yang disalurkan merupakan beras medium dengan kualitas yang sama seperti beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras diterima Bulog dalam kemasan curah 50 kilogram, kemudian dikemas ulang menjadi 10 kilogram sebelum diberikan kepada penerima. Proses tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko persoalan dalam distribusi. Tantangan penyaluran terutama berkaitan dengan akses wilayah, waktu distribusi yang terbatas, serta kesiapan penerima manfaat.

Dengan distribusi 445,5 ton beras kepada 14.850 KPM, pemerintah berharap bantuan tersebut tepat sasaran sekaligus ikut menjaga stabilitas harga beras medium di pasar. Program itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meringankan beban rumah tangga penerima di Kota Baubau.*)

Rapat Paripurna HUT RI, Walikota Baubau H Yusran Tekankan Pembangunan Tepat Mutu dan Sasaran, Ajak DPRD Kawal Pembangunan dan Simak Pidato Kenegaraan Presiden

paikan saat memberikan pidato pengantar pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Baubau dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Yusran mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar momentum seremonial, tetapi menjadi refleksi atas perjuangan, pengorbanan dan keteguhan bangsa dengan kerja nyata,” ujarnya.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Baubau bersama DPRD terus memperkuat kemitraan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Ia menekankan, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, disertai kemitraan yang kritis namun konstruktif, menjadi salah satu kunci mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Yusran memaparkan sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Baubau pada 2026. Program tersebut diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penataan kawasan perkotaan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah melakukan rehabilitasi Puskesmas Lakologou dan Puskesmas

jahtera dan berdaya saing.

Yusran juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Pengawasan, dukungan dan partisipasi aktif DPRD serta masyarakat menjadi bagian penting agar setiap program dapat berjalan sesuai target.

“Mari kita kawal bersama seluruh program pembangunan ini agar berjalan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Baubau,” ajaknya.

Ia menilai Pidato Kenegaraan Presiden yang akan didengarkan dalam rapat paripurna tersebut bukan hanya menjadi laporan kinerja pemerintah pusat, tetapi juga dapat menjadi arah

strategis dan pijakan bagi daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.

Karena itu, Yusran mengajak seluruh jajaran pemerintah, DPRD, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, insan pers, pemuda dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai penguat semangat membangun daerah.

“Mari bergerak mewujudkan Baubau yang semakin maju, adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Baubau tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat komitmen pembangunan di Kota Baubau.*)

Prabowo, Jokowi, dan Gibran Duduk Berdampingan di HUT RI, Gerindra Buka Suara



Presiden RI Prabowo Subianto duduk diapit Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menyaksikan penampilan pesawat tempur TNI Angkatan Udara.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, dinilai sebagai gambaran hubungan baik antarpemimpin bangsa. Partai Gerindra menyebut tidak ada hal yang luar biasa dari posisi keduanya yang duduk berdampingan dalam rangkaian perayaan kenegaraan tersebut.

Momen itu terjadi setelah upacara peringatan HUT ke-81 RI pada Senin (17/8). Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat berada di area utama Istana Merdeka untuk menyaksikan atraksi udara yang ditampilkan pesawat tempur TNI Angkatan Udara.

Ketiganya tampak duduk dalam satu barisan. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo, Jokowi, dan Gibran terlihat berbincang, tersenyum, dan tertawa ketika menyaksikan pertunjukan udara tersebut.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan kehadiran mantan presiden dalam peringatan hari kemerdekaan merupakan bagian dari tradisi kenegaraan. Karena itu, posisi Jokowi yang duduk sejajar dengan presiden dan wakil presiden tidak semestinya dipandang sebagai sesuatu yang janggal.

“Jadi sangat wajar apabila beliau duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam upacara kenegaraan tersebut,” ujar Bahtra saat dihubungi, Selasa (18/8).

Menurut Bahtra, hubungan Prabowo dengan para pemimpin terdahulu maupun tokoh bangsa selama ini berjalan baik. Komu-

nikasi dan silaturahmi, kata dia, tetap dijaga meskipun para tokoh tersebut tidak lagi berada dalam posisi sebagai pejabat aktif.

Prabowo, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra, disebut terus memelihara komunikasi dengan para mantan pemimpin Indonesia. Jokowi menjadi salah satu tokoh yang tetap berada dalam lingkaran komunikasi tersebut.

Bahtra menilai percakapan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran yang disertai senyum serta tawa menunjukkan suasana pertemuan yang berlangsung secara natural. Ia tidak melihat kebersamaan tersebut sebagai sesuatu yang dibuat-buat untuk kepentingan tertentu.

“Karena itu kalau terlihat berbincang, tersenyum, atau tertawa bersama, saya kira itu suasana yang natural dan mencerminkan hubungan yang baik,” katanya.

Ia juga menilai hubungan yang baik di antara para tokoh nasional penting untuk menjadi teladan bagi elite politik lainnya. Perbedaan posisi politik, menurut dia, tidak semestinya menghilangkan ruang komunikasi dan penghormatan antarpemimpin.

“Hubungan Pak Prabowo dengan para pemimpin terdahulu dan para tokoh bangsa juga selama ini terjalin baik,” ujar Bahtra.

Kebersamaan Prabowo dan Jokowi tersebut juga tidak terlepas dari konteks peringatan kemerdekaan yang secara tradisional mempertemukan berbagai generasi kepemimpinan nasional. Mantan presiden dan wakil presiden pada sejumlah kesempatan memang hadir dalam agenda kenegaraan untuk memperingati momentum penting Republik Indonesia.

Secara historis, peringatan kemerdekaan menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kembali para pemimpin Indonesia lintas periode. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kesinambungan kehidupan bernegara.

Dalam sejarah politik Indonesia, pergantian kepemimpinan nasional juga berlangsung melalui berbagai dinamika. Indonesia telah dipimpin oleh sejumlah presiden dengan latar belakang dan corak pemerintahan yang berbeda, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto.

Pergantian kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan negara tidak berhenti pada pergantian figur di tampuk pemerintahan. Hubungan antara pemimpin yang sedang menjabat dengan para pendahulunya menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesinambungan kehidupan politik dan kenegaraan.

Tradisi serupa juga dikenal di sejumlah negara lain. Dalam sistem demokrasi, mantan kepala negara atau kepala pemerintahan kerap tetap memiliki ruang dalam kegiatan kenegaraan, terutama pada momentum nasional yang mempertemukan berbagai unsur bangsa.

Dalam konteks Indonesia, suasana kebersamaan pada peringatan HUT RI memiliki makna simbolik yang lebih luas. Pertemuan antara pemimpin aktif dan mantan pemimpin

dapat memperlihatkan bahwa kompetisi politik tidak harus berujung pada putusannya hubungan personal maupun komunikasi antartokoh.

Momen Prabowo, Jokowi, dan Gibran di Istana Merdeka kemudian menjadi perhatian karena ketiganya memiliki hubungan politik yang berkembang dalam dinamika pemerintahan beberapa tahun terakhir. Jokowi merupakan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode sebelum Prabowo menggantikannya pada 2024, sementara Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan saat ini.

Dari sisi tempat dan waktu, kebersamaan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin pagi, 17 Agustus 2026, setelah Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Prabowo, Jokowi, dan Gibran menyaksikan atraksi pesawat tempur TNI AU dari area utama Istana.

Bagi Gerindra, momen tersebut terutama harus ditempatkan dalam kerangka hubungan antartokoh bangsa. Bahtra menilai komunikasi yang terbuka dan hubungan yang baik di antara elite nasional justru dapat memberikan contoh bahwa perbedaan peran politik tidak menghalangi seseorang untuk tetap menjaga persaudaraan kebangsaan.

Kebersamaan itu sekaligus memperlihatkan dimensi lain dari peringatan kemerdekaan. Di tengah perubahan pemerintahan dan dinamika politik nasional, para pemimpin tetap memiliki ruang untuk bertemu dalam satu pangung kenegaraan dan menunjukkan penghormatan terhadap perjalanan bangsa.

Dengan demikian, Gerindra meminta momen tersebut dilihat secara proporsional. Duduk berdampingan, berbincang, dan tertawa bersama antara Prabowo dan Jokowi dinilai sebagai bagian dari suasana perayaan HUT RI sekaligus cerminan bahwa hubungan antartokoh nasional tetap dapat berjalan baik setelah pergantian kekuasaan. (*)

Biaya Haji 2027 Naik, Pemerintah Usulkan BPIH Rp107,34 Juta



JAKARTA, BP- Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah. Dari total tersebut, porsi yang dibebankan langsung kepada jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) diusulkan Rp42.936.068,81 atau 40 persen, sedangkan 60 persen atau Rp64.404.103,21 berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Usulan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8). Pemerintah menyatakan rancangan tersebut masih akan dibahas bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi biaya resmi penyelenggaraan haji.

Kenaikan total BPIH tersebut mencapai sekitar 10% “15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah berupaya agar peningkatan biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah tidak terlalu signifikan. Strategi itu dilakukan dengan memperbesar porsi nilai manfaat dalam struktur pembiayaan haji 2027.

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi Bipih sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40 persen dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60 persen,” kata Irfan.

Perubahan komposisi tersebut cukup mencolok jika dibandingkan dengan rancangan pembiayaan haji 2026. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, BPIH 2026 mencapai Rp87.409.365 per jemaah, dengan 62 persen berasal dari setoran jemaah dan 38 persen ditanggung melalui nilai manfaat BPKH.

Secara historis, struktur biaya haji Indonesia memang mengalami perubahan seiring dinamika biaya pelayanan, penerbangan, kurs, serta kebijakan pengelolaan dana haji. Pada 2025, misalnya, pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata BPIH sebesar Rp89.410.258,79, turun dari Rp93.410.286 pada 2024. Pada 2025, rata-rata Bipih yang dibayarkan jemaah sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen, sedangkan nilai manfaat sebesar Rp33.978.508,01 atau 38 persen.

Sementara itu, pada 2023 rata-rata BPIH yang akhirnya disepakati pemerintah dan DPR mencapai Rp90.050.637,26. Komposisinya terdiri atas Bipih sebesar Rp49.812.700,26 atau 55,3 persen dan nilai manfaat rata-rata Rp40.237.937 atau 44,7 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa porsi pembiayaan dari nilai manfaat telah menjadi bagian penting dalam menjaga keterjangkauan biaya yang dibayarkan jemaah.

Dalam rancangan 2027, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dan Rp4.666,67 per Saudi Riyal. Asumsi kurs menjadi salah satu faktor penting karena sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan haji berlangsung di Arab Saudi dan menggunakan mata uang asing.

Komponen biaya hidup jemaah atau living cost juga diusulkan tetap sebesar 750 Saudi Riyal. Angka tersebut tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga kenaikan total BPIH tidak berasal dari komponen biaya hidup tersebut.

Salah satu komponen yang mengalami penyesuaian cukup besar adalah biaya penerbangan. Pemerintah mengusulkan biaya penerbangan meningkat dari Rp32.012.885 menjadi Rp40.529.919 per jemaah. Kenaikan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan BPIH 2027.

Menurut pemerintah, kenaikan biaya penerbangan berkaitan dengan meningkatnya harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain faktor ekonomi, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga dinilai dapat memengaruhi harga minyak dunia dan biaya penerbangan.

“Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi harga minyak dunia dan biaya penerbangan,” demikian penjelasan pemerintah mengenai salah satu faktor penyebab penyesuaian biaya tersebut.

Dari sisi regulasi, BPIH dan Bipih memang memiliki pengertian berbeda. BPIH merupakan keseluruhan biaya yang diperlukan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan Bipih merupakan biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah. Nilai manfaat berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana haji. Ketentuan mengenai sumber pembiayaan BPIH antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam praktiknya, besaran biaya juga berkaitan dengan sejumlah layanan yang diterima jemaah, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, hingga perlindungan serta pelayanan keimigrasian. Komponen-komponen tersebut tercermin dalam pengaturan biaya haji yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

Besarnya biaya penerbangan juga memiliki konteks internasional. Penyelenggaraan haji melibatkan mobilitas jutaan jemaah dari berbagai negara menuju Arab Saudi dalam periode yang relatif bersamaan. Karena itu, perubahan harga energi global, nilai tukar, kapasitas penerbangan, serta kondisi geopolitik dapat ikut memengaruhi biaya transportasi udara dan keseluruhan biaya penyelenggaraan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbesar. Pada penyelenggaraan haji 2025, Indonesia memperoleh kuota 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Besarnya kuota tersebut menggambarkan skala penyelenggaraan haji Indonesia sekaligus besarnya kebutuhan pembiayaan yang harus dikelola setiap musim haji.

Dengan struktur baru yang diusulkan, pemerintah berharap peningkatan kualitas pelayanan tetap dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada jemaah. Pemerintah juga menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan BPIH 2027.

“Kami berharap pembahasan usulan BPIH tersebut dapat dilakukan bersama DPR RI sesuai dengan jadwal penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” ujar Irfan.

Usulan tersebut kini memasuki tahap pembahasan bersama DPR RI. Hasil pembahasan pemerintah dan DPR akan menentukan besaran biaya haji yang selanjutnya menjadi dasar penetapan resmi BPIH 2027. Dengan demikian, angka Rp107,34 juta per jemaah yang disampaikan pemerintah saat ini masih berstatus usulan, bukan biaya final yang harus dibayarkan jemaah. (Alwin)

Pimpin Upacara HUT RI ke-81, Gubernur Sultra ASR Bicara Jembatan Emas Menuju 2045



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka mengajak masyarakat menjadikan 81 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum memperkuat kontribusi melalui karya nyata. Pesan tersebut disampaikan setelah ia memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (17/8/2026).

Menurut Andi Sumangerukka, kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui seremoni tahunan. Nilai perjuangan para pendahulu harus diteruskan melalui kerja, pengabdian, serta evaluasi terhadap berbagai hal yang telah dilakukan masyarakat dan pemerintah.

“Pesan saya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, mari kita maknai hari ulang tahun ini untuk merefleksikan 81 tahun yang lalu, ketika para pejuang telah memberikan kita kesempatan dengan memperkuat jembatan emas. Sekarang jembatan emas itu akan kita lalui dengan karya-karya kita untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia mengatakan setiap warga memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Karena itu, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui karya sekaligus sikap introspektif agar pembangunan terus mengalami perbaikan.

“Mari kita berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan selalu mengintrospeksi diri tentang apa yang sudah kita lakukan,” katanya.

Pesan tersebut

memiliki konteks historis yang panjang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah perjuangan panjang melawan penjajahan. Dalam catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Proklamasi menjadi perwujudan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia setelah periode kolonial dan pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Lima tahun setelah Proklamasi, Indonesia diterima sebagai anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Keanggotaan tersebut menandai semakin kuatnya posisi Indonesia dalam komunitas internasional setelah mempertahankan kemerdekaannya.

Dalam konteks kekinian, gagasan melanjutkan perjuangan melalui karya juga berkelindan dengan agenda Indonesia Emas 2045. Pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 menempatkan dua dekade mendatang sebagai periode pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. RPJPN tersebut resmi disahkan melalui UU Nomor 59 Tahun 2024.

Bappenas menetapkan lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045, antara lain pendapatan per kapita setara negara maju, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, meningkatnya kepemimpinan Indonesia di tingkat global, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

Di Kendari, upacara HUT ke-81 RI berlangsung khidmat dengan Paskibraka Sultra menjalankan tugas

pengibaran Sang Saka Merah Putih secara lancar. Komandan upacara adalah Letnan Kolonel POM Oky Jongko Lukito yang menjabat Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Halu Oleo.

Sementara itu, Syafira Dhaniarti Az-Zahrah dari Kota Baubau dipercaya sebagai pembawa baki. Ia berhasil menjalankan tugas tersebut dalam prosesi pengibaran bendera pada upacara tingkat Provinsi Sultra.

Upacara dihadiri Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Sultra, staf ahli gubernur, asisten Setda, para kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, prajurit TNI-Polri, ASN, pelajar, serta pejabat terkait. Andi Sumangerukka hadir bersama Ketua TP PKK Sultra, Arinta Andi Sumangerukka.

Rangkaian peringatan kemerdekaan di Sultra tidak hanya berlangsung di ibu kota provinsi. Pada waktu yang sama, Wakil Gubernur Sultra Hugua mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam kegiatan HUT ke-81 RI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai inspektur upacara di Kantor Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka kemudian menuju Desa Sorue Jaya untuk mengikuti rangkaian kegiatan di KNMP bersama Menteri KKP dan Wakil Gubernur Hugua. Kehadiran pimpinan daerah dalam dua lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan di Sultra.

Dalam upacara tingkat provinsi itu, Pemprov Sultra juga memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada tiga ASN yang telah mengabdikan selama 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian aparaturnegara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain penghargaan bagi ASN, Pemerintah Provinsi Sultra menyerahkan bantuan sosial berupa hibah alat bantu masing-masing senilai Rp10 juta kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas Arolomagi Kabupaten Muna dan LKS Lansia Al-Aziz Kota Kendari melalui Dinas Sosial Provinsi Sultra.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan penyerahan bantuan satu unit mobil operasional dari Bank Sultra kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendaraan tersebut diperuntukkan mendukung pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra.

Berbagai kegiatan tersebut menempatkan peringatan HUT ke-81 RI bukan semata sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum memperkuat pengabdian, pelayanan sosial, dan pembangunan. Bagi Sultra, pesan Gubernur Andi Sumangerukka untuk mengisi kemerdekaan melalui karya menjadi bagian dari upaya menerjemahkan semangat 1945 ke dalam tantangan pembangunan menuju 2045.(*)

Gubernur Andi Sumangerukka Serahkan Remisi kepada 1.943 Warga Binaan Sultra

KENDARI, BP- Sebanyak 1.943 narapidana dan Anak Binaan di Sulawesi Tenggara memperoleh Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 18 warga binaan dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Senin (17/8/2026). Pemberian remisi menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang menjalani proses pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Dari keseluruhan penerima, sebanyak 1.909 narapidana memperoleh Remisi Umum I. Sementara itu, 17 narapidana mendapatkan Remisi Umum II yang membuat mereka langsung bebas. Pada kelompok Anak Binaan, sebanyak 16 orang menerima Pengurangan Masa Pidana Umum I dan satu orang memperoleh Pengurangan Masa Pidana Umum II atau langsung bebas.

Sebaran penerima remisi menunjukkan bahwa pemberian hak tersebut berlangsung di delapan satuan kerja pemasyarakatan di Sultra. Lapas Kelas IIA Kendari mencatat jumlah penerima terbanyak dengan 759 orang, disusul Lapas Kelas IIA Baubau sebanyak 254 orang dan Rutan Kelas IIB Unaaha sebanyak 228 orang.

Berikutnya, masing-masing 198 warga binaan di Rutan Kelas IIA Kendari dan Rutan Kelas IIB Kolaka menerima remisi. Rutan Kelas IIB Raha tercatat memberikan remisi kepada 154 orang, Lapas Perempuan Kelas III Kendari kepada 100 orang, serta LPKA Kelas II Kendari kepada 52 orang.

Selain Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana, pemerintah juga memberikan Remisi Tambahan kategori pemuka kepada 21 narapidana. Remisi tambahan itu diperuntukkan bagi warga binaan yang memenuhi ketentuan serta berperan aktif dalam kegiatan pembinaan di satuan kerja pemasyarakatan.

Bagi Andi Sumangerukka, pemberian remisi tidak semata-mata berkaitan dengan pengurangan waktu menjalani hukuman. Remisi merupakan penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan kepatuhan dan mengikuti proses pembinaan dengan baik.

“Remisi ini merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik. Saya berharap pemberian remisi ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat,” kata Andi Sumangerukka.

Pesan tersebut terutama ditujukan kepada 18 warga binaan yang memperoleh kebebasan pada momentum HUT ke-81 RI. Gubernur mengingatkan agar kesempatan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat tidak disia-siakan dengan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

“Gunakan kebebasan ini sebaik-baiknya. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bangun kembali kehidupan bersama keluarga dan jadilah warga yang taat hukum serta bermanfaat bagi lingkungan,” ujar Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto. Menteri menempatkan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk menghayati kembali nilai perjuangan bangsa sekaligus menerjemahkannya dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Menurut Menteri Imipras, penyelenggaraan pemasyarakatan harus

berjalan seiring dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang humanis. Pembinaan warga binaan juga harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jajaran pemasyarakatan, kata Menteri, dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Prinsip tersebut diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan warga binaan dapat berjalan secara optimal.

Pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sendiri bukan sekadar tradisi dalam peringatan hari kemerdekaan. Hak tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembinaan narapidana dan telah memiliki landasan hukum, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kemudian mengalami sejumlah perubahan.

Secara historis, kebijakan remisi juga tidak terlepas dari perkembangan sistem pemasyarakatan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pendekatan terhadap penghukuman secara bertahap berkembang dari orientasi kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam proses pemulihan warga binaan.

Perkembangan tersebut sejalan dengan kecenderungan internasional dalam memperlakukan narapidana secara lebih manusiawi. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 Desember 2015 mengadopsi United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, yang kemudian dikenal sebagai Nelson Mandela Rules. Standar tersebut menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap narapidana, perlindungan martabat manusia, serta pembinaan untuk mendukung proses kembali ke masyarakat.

Dalam konteks itu, remisi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemotongan masa hukuman. Pengurangan masa pidana dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong warga binaan mengikuti pembinaan, menjaga perilaku, serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.

Karena itu, 18 warga binaan yang langsung bebas pada HUT ke-81 RI menghadapi tahap baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan proses pembinaan pada akhirnya tidak hanya diukur dari berkurangnya masa pidana, tetapi juga dari kemampuan mantan warga binaan beradaptasi dan kembali menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.

“Pemberian remisi menjadi bagian dari proses pembinaan yang diharapkan mampu mendorong warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat,” demikian pesan yang ditekankan dalam momentum tersebut.

Upacara penyerahan remisi di Lapas Kelas IIA Kendari turut dihadiri Anggota Forkopimda Sultra, pimpinan instansi vertikal, Pj. Sekretaris Daerah Sultra, serta sejumlah pejabat terkait. Kehadiran unsur pemerintah dan aparat penegak hukum tersebut menandai pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di daerah.

Dengan jumlah penerima mencapai 1.943 orang, pemberian remisi pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sultra sekaligus menjadi pengingat bahwa penghukuman dan pembinaan harus berjalan beriringan. Negara memberikan konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. *(Lisna)*

HUT RI ke-81, Bupati Buton Alvin Akawijaya Pimpin Pembentangan Bendera Raksasa di Bukit Lambiku



BUTON, BP- "Semangat kemerdekaan mewarnai Bukit Lambiku, Jalan Poros GOR Pasarwajo, Kabupaten Buton, ketika Bendera Merah Putih raksasa dibentangkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan yang dipimpin Bupati Buton tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, santri, serta Bhayangkari.

Pembentangan bendera menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan yang tidak sekadar bersifat seremonial. Pemerintah Kabupaten Buton menjadikannya momentum untuk memperkuat nasionalisme, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Bendera raksasa yang dibentangkan di kawasan perbukitan itu sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Bupati Buton bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, S.T., Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M.Tr., Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua

dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pasukan yang terlibat tidak hanya berasal dari aparat keamanan. Personel TNI dan Polri bersama para santri Pondok Pesantren Al-Ikhlash dan ibu-ibu Bhayangkari turut ambil bagian dalam pembentangan Bendera Merah Putih raksasa tersebut. Kehadiran berbagai kelompok itu memperlihatkan keterlibatan lintas elemen dalam memperingati kemerdekaan.

Rangkaian kegiatan dimulai dari Rumah Jabatan Bupati Buton. Di tempat tersebut, Bupati Buton bersama Kapolres Buton menyerahkan Bendera Merah Putih kepada personel TNI dan Polri yang ditugaskan membawa serta membentangkannya di Bukit Lambiku.

Momentum tersebut memiliki akar historis yang kuat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme. Sejak itu, peringatan kemerdekaan setiap tahun tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga ruang untuk mengingat kembali pengorbanan para pejuang dan memperkuat identitas kebangsaan.

Secara internasional, perjuangan kemerdekaan Indonesia juga berlangsung dalam konteks gelombang dekolonisasi dunia setelah Perang Dunia II. Proses tersebut

kemudian mendorong lahirnya banyak negara baru di Asia dan Afrika. Indonesia turut memainkan peran penting dalam perkembangan gerakan negara-negara yang memperjuangkan kedaulatan dan menolak kolonialisme.

"Pembentangan Merah Putih ini menjadi simbol semangat kebangsaan sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan," demikian semangat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buton juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat gotong royong, serta mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi nyata bagi daerah dan Indonesia.

"Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui persatuan, kepedulian, dan kerja bersama," menjadi pesan utama yang mengiringi kegiatan tersebut. Dari Bukit Lambiku, Merah Putih bukan hanya dibentangkan sebagai simbol, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kemerdekaan perlu terus dirawat melalui pembangunan dan pengabdian. (*La harman*)

Bupati Buton Tengah Azhari Kukuhkan 72 Paskibraka untuk Upacara HUT ke-81



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mengukuhkan 72 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Halaman Rumah Jabatan Bupati Buton Tengah, Sabtu (15/8/2026). Para pelajar tersebut disiapkan untuk mengibarkan Sang Merah Putih dalam upacara kenegaraan tingkat kabupaten.

Sebanyak 72 anggota Paskibraka itu terdiri atas 37 laki-laki dan 35 perempuan. Mereka telah menjalani pembinaan dan latihan secara intensif sebelum dipercaya mengemban tugas pada peringatan hari kemerdekaan. Pengukuhan turut disaksikan Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Wakapolres Buton Tengah, perwakilan Yonif TP 870/Sangia Wambulu, Plh. Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam amanatnya, Azhari menekankan bahwa keikutsertaan dalam Paskibraka bukan sekadar menjalankan tugas seremonial, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda. "Pengukuhan ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan semangat nasionalisme," kata Azhari.

Ia berharap seluruh anggota mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk masa depan.

"Laksanakan tugas dengan baik dan jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara," ujarnya.

Usai pengukuhan, Azhari menyalami satu per satu anggota Paskibraka dan berdialog singkat dengan mereka mengenai sekolah, daerah asal, serta cita-cita. Interaksi tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap para pelajar yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan untuk mewakili generasi muda Buton Tengah.

Secara historis, tradisi pengibaran bendera pada peringatan kemerdekaan berakar dari upacara Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta, ketika Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi. Sejak dekade 1960-an, pembentukan pasukan pengibar bendera berkembang menjadi program nasional yang kemudian dikenal sebagai Paskibraka untuk menanamkan disiplin dan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar.

Tradisi penghormatan terhadap bendera juga dikenal di berbagai negara, meski dengan bentuk berbeda. Di Amerika Serikat, misalnya, upacara pengibaran bendera menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan 4 Juli, sementara sejumlah negara Asia mengembangkan korps pengibar bendera pelajar sebagai sarana pendidikan karakter dan kepemimpinan. Di Indonesia, Paskibraka tetap menjadi salah satu simbol keterlibatan generasi muda dalam menjaga nilai kebangsaan dan menghormati sejarah perjuangan kemerdekaan. (*)

Air Laut Naik Pascagempa NTT, Bupati Buton Alvin Akawijaya Turun Pantau Pesisir Warga

Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton bergerak cepat memantau kondisi kawasan pesisir setelah gempa yang mengguncang wilayah Mbay-Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026), memicu peringatan dini tsunami dan menyebabkan kenaikan air laut di sejumlah pesisir Pulau Buton. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra bersama Wakil Bupati Syarifudin Saafa, ST, dan Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M., turun langsung memastikan kondisi warga tetap aman.

Gempa tersebut terjadi pada Sabtu



sekitar pukul 04.58 WIB. Dampak guncangan dan perubahan kondisi muka air laut kemudian dirasakan di wilayah pesisir Buton sehingga sempat menimbulkan kepanikan masyarakat. Pemerintah daerah merespons dengan meningkatkan pemantauan dan mengeluarkan peringatan dini sebagai langkah antisipasi ter-

hadap kemungkinan ancaman tsunami.

Setelah melakukan evaluasi, BMKG menyatakan kondisi aman sehingga peringatan dini tsunami yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah akhirnya dicabut. Kendati demikian, Alvin meminta masyarakat tidak menganggap remeh situasi kebencanaan dan tetap

mengutamakan keselamatan.

"Silakan melaksanakan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap waspada, tidak panik, dan senantiasa mengutamakan keselamatan keluarga," kata Alvin saat menemui warga di kawasan pesisir.

Bupati juga mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk mempertimbang-

kan menunda aktivitas melaut pada hari tersebut. Imbauan itu disampaikan sebagai bentuk kehati-hatian meskipun status peringatan tsunami telah dinyatakan aman oleh BMKG.

"Kalau bisa hari ini jangan dulu melaut. Meski BMKG telah mengeluarkan status aman, kita harus tetap waspada," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Alvin meminta warga tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena informasi keliru berpotensi memperbesar kepanikan.

"Informasi harus mengacu pada sumber resmi BMKG, BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah setempat," katanya. Pesan tersebut menjadi penting mengingat wilayah Indonesia berada di kawasan tektonik aktif yang memiliki risiko gempa dan tsunami cukup tinggi.

Catatan sejarah menunjukkan pentingnya kewaspadaan tersebut. Tsunami Aceh pada 26 Desem-

ber 2004 menewaskan lebih dari 230.000 orang di sejumlah negara dan menjadi salah satu bencana tsunami terbesar dalam sejarah modern. Tragedi itu kemudian mendorong Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami atau InaTEWS, yang diresmikan pada 2008.

Peristiwa tsunami Pangandaran pada 17 Juli 2006 juga menjadi pelajaran penting. Gempa berkekuatan M7,7 memicu tsunami dengan ketinggian sekitar 4-8 meter dan menewaskan 668 orang. BMKG menyebut peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penguatan sistem peringatan dini tsunami Indonesia. Karena itu, peninjauan Bupati, Wakil Bupati, dan Kapolres Buton tidak hanya menjadi respons terhadap kondisi pesisir, tetapi juga bagian dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tetap siap menghadapi potensi bencana. (*)

RSUD Ruteng Rusak Diguncang Gempa, Operasi Pasien Dipindah ke Fasilitas Darurat



RUTENG, BP- Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan medis bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur tetap berjalan meski sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang terdampak gempa, sementara melayani pasien di tenda darurat hingga rumah sakit lapangan dengan fasilitas operasi selesai dibangun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung kondisi pelayanan di RSUD Ruteng, Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan pasien dengan cedera berat tetap memperoleh penanganan, termasuk korban patah tulang yang membutuhkan tindakan pembedahan. Salah satunya Yosef, 12 tahun, yang mengalami patah tulang paha setelah rumah tertangganya roboh akibat gempa.

Menurut Budi, penanganan cepat diperlukan agar cedera yang dialami korban tidak menimbulkan kecacatan permanen. Yosef, kata dia, harus segera menjalani operasi agar dapat kembali beraktivitas dan mengejar cita-citanya sebagai pemain sepak bola. “Kalau tidak dioperasi, nanti sembuhnya bisa cacat. Dia tidak bisa main bola lagi,” ujar Budi saat meninjau pasien tersebut.

Untuk memperkuat layanan bedah dan trauma, Kemenkes memobilisasi dokter spesialis ortopedi dari sejumlah rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran. Tim tersebut antara lain berasal dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya,

RSUP Dr. Sardjito, RSUD Ben Mboi, serta Universitas Hasanuddin. Kehadiran tim spesialis difokuskan pada penanganan pasien dengan patah tulang dan trauma yang banyak ditemukan setelah gempa.

“Para dokter ortopedi ini sudah mau membantu menyembuhkan pasien-pasien yang membutuhkan penanganan,” kata Budi. Ia menegaskan, keterbatasan bangunan rumah sakit tidak boleh menghentikan pelayanan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan segera. Karena itu, Kemenkes menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, yang akan dilengkapi ruang operasi sehingga tindakan pembedahan dapat dilakukan dengan lebih aman.

Langkah serupa disiapkan di RSUD Nagekeo. Kedua fasilitas rujukan tersebut mengalami kerusakan akibat gempa sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal. “Karena rumah sakitnya sekarang tidak aman digunakan, kita sedang membangun rumah sakit lapangan. Di sana nanti dokter-dokter bisa melakukan operasi dengan baik,” ujar Budi.

Selain memulihkan layanan di rumah sakit, Kemenkes memperluas respons hingga tingkat puskesmas dan desa. Tim kesehatan dan relawan akan dikerahkan untuk melakukan penyisiran di wilayah terdampak, mengidentifikasi warga yang membutuhkan pertolongan, serta menentukan pasien yang harus dirawat atau segera dirujuk. “Kita perlu sekali mengirim tim

relawan ke seluruh puskesmas yang ada di Flores Utara untuk menyapu bersih semua desa,” kata Budi.

Pola pengoperasian fasilitas kesehatan sementara tersebut bukan hal baru dalam penanganan bencana. Setelah gempa dan tsunami Sulawesi Tengah pada 2018, Kemenkes mencatat sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang mengalami kerusakan tetap memberikan pelayanan menggunakan tenda; saat itu, sembilan rumah sakit di Palu, satu di Donggala, dan dua di Sigi telah kembali beroperasi. Secara global, model rumah sakit lapangan juga menjadi bagian penting respons bencana. Dalam gempa 7,3-kiye-Suriah 2023, sedikitnya 15 rumah sakit di 7-kiye mengalami kerusakan dan tim medis darurat internasional dikerahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan, termasuk melalui rumah sakit lapangan.

Kemenkes kini berkoordinasi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, perguruan tinggi, dan jejaring tenaga kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan di wilayah terdampak gempa NTT. Mobilisasi dokter spesialis, pembangunan fasilitas medis sementara, serta penyisiran kesehatan hingga desa menjadi strategi untuk mempercepat penanganan korban sekaligus memulihkan layanan kesehatan yang terganggu.(Andina Latief)

Kemenkes Percepat Pemulihan Layanan Kesehatan Pascagempa NTT



JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa berdampak pada delapan kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan rumah sakit daerah terdampak kembali menjalankan operasional dasar paling lama dalam satu minggu, sementara puskesmas yang rusak ditargetkan kembali melayani kebutuhan dasar dalam dua pekan. Langkah itu ditempuh untuk menjaga layanan medis sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan pasien dalam beberapa hari mendatang.

Berdasarkan laporan situasi per 15 Agustus 2026, terdapat 21 rumah sakit terdampak. Sebanyak 16 rumah sakit masih beroperasi penuh, empat beroperasi sebagian, dan satu belum beroperasi. Dari sisi kerusakan, tiga rumah sakit mengalami rusak berat, enam rusak ringan, sedangkan 12 lainnya tidak mengalami kerusakan struktur. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemulihan diprioritaskan pada fungsi layanan esensial, terutama operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisis. “Prioritas utama untuk mengembalikan fungsi layanan di seluruh rumah sakit kabupaten/kota terdampak, untuk menghadapi lonjakan pasien dalam beberapa hari ke depan,” kata Budi di Jakarta, Minggu (16/8/2026). Perhatian khusus diberikan kepada RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng yang dinilai membutuhkan penguatan pelayanan. Kemenkes mengerahkan Rumah Sakit Lapangan dan Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri atas dokter spesialis bedah, anestesi, dan emergensi.

RSUD Nagekeo yang mengalami kerusakan berat juga akan mendapat satu set Rumah Sakit Mobil pada Senin (17/8/2026). Fasilitas tersebut dilengkapi ruang operasi untuk mempertahankan pelayanan medis dasar dan penanganan kegawatdaruratan selama proses rehabilitasi. Untuk kebutuhan rujukan, RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nagekeo. RSUD Borong sebelumnya masuk Program Quick Win dengan target waktu rujukan dua jam,

sedangkan RSUD Komodo memiliki target rujukan empat jam.

Di tingkat layanan primer, dari 190 puskesmas terdampak, sebanyak 122 masih beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum dapat beroperasi. Sebanyak 20 puskesmas mengalami rusak berat, 37 rusak sedang, dan 11 rusak ringan, sedangkan 116 fasilitas tidak mengalami kerusakan. Kemenkes menargetkan layanan dasar, terutama pemeriksaan ibu hamil, persalinan, dan imunisasi, dapat kembali berjalan dalam waktu dua pekan. Untuk memperkuat koordinasi, Health Emergency Operation Center (HEOC) diaktifkan di sembilan titik, terdiri atas satu HEOC tingkat pusat/provinsi dan delapan HEOC tingkat kabupaten/kota.

Respons lapangan diperkuat dengan pengiriman dua Tim Manajemen Krisis Kesehatan ke Sikka dan Ende serta dua tim EMT. Pada 16 Agustus, Kemenkes mendistribusikan delapan paket obat-obatan dasar, lima paket Emergency Kit, 1.000 sarung tangan steril, 20.000 sarung tangan nonsteril, 20.000 masker bedah, 10 unit oksigen konsentrator, dan dua tenda pos kesehatan. Delapan tenda tambahan turut disiagakan. Langkah tersebut menjadi bagian dari sistem respons kesehatan yang kini jauh lebih terstruktur dibandingkan masa lalu. Gempa Flores 1992, misalnya, tercatat sebagai salah satu bencana gempa paling mematikan di Indonesia dengan sedikitnya 2.200 orang tewas atau hilang menurut USGS, sementara BNPB mencatat sekitar 2.100 korban jiwa dan tsunami hingga 25 meter. Pengalaman bencana besar, termasuk tsunami Samudra Hindia 2004 yang berdampak lintas negara, turut memperkuat kesadaran pentingnya sistem respons kesehatan dan koordinasi kebencanaan yang cepat.

Kemenkes selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dinas kesehatan kabupaten/kota, BNPB, dan Basarnas untuk memastikan tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, serta sarana pendukung tersedia di wilayah terdampak. “Langkah pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memastikan layanan kesehatan dasar tetap berjalan,” ujar Kemenkes. Pemerintah berharap pemulihan fasilitas tidak hanya mengembalikan operasional rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga memastikan sistem pelayanan mampu menghadapi kebutuhan medis yang berpotensi meningkat setelah gempa.(Andina Latief)

PT FAREN GRAFIKA

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Praperadilan Lodewyk, Nama Pejabat Pengadaan BGN Bakal Diungkap



Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dijadwalkan memberikan keterangan secara daring dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Dalam persidangan tersebut, pihak Lodewyk akan mempersoalkan keabsahan penyitaan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sekaligus menjelaskan posisi Lodewyk dalam perkara pengadaan di BGN.

Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, mengatakan kehadiran kliennya melalui Zoom telah memperoleh penetapan dari PN Jakarta Pusat. Pemeriksaan secara daring itu, menurut dia, menjadi kesempatan bagi Lodewyk untuk memberikan klarifikasi langsung mengenai perkara yang kini dihadapinya.

“Pemeriksaan besok via Zoom dari Pusung sendiri, sudah dibuat penetapannya,” ujar OC Kaligis kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Menurut OC Kaligis, salah satu pokok keterangan yang akan disampaikan Lodewyk berkaitan dengan pihak-pihak yang disebut memiliki peran dalam proses pengadaan di lingkungan BGN. Ia menyebut sejumlah pejabat yang menurutnya mempunyai posisi strategis dalam rangkaian pengadaan tersebut.

Nama yang disebut antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana selaku Pengguna Anggaran, Nyoto Suwignyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Budi Utomo, Ermas Isnaeni Lukman, dan Dohardo Pakpahan yang disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu,

OC Kaligis menyebut Sony Sonjaya sebagai Pemberi Verifikasi Izin Dapur.

Penyebutan nama-nama tersebut menjadi bagian dari argumentasi pihak Lodewyk untuk menjelaskan pembagian peran dalam proses pengadaan. Kuasa hukum Lodewyk menyatakan kliennya tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam pengadaan barang dan jasa yang dipersoalkan penyidik.

“Pusung sama sekali tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam semua ini untuk pengadaan barang dan jasa. Itu saja yang akan dijelaskan besok, baik oleh Pusung maupun oleh tiga ahli dari MBG, dari Badan Gizi Nasional,” kata OC Kaligis.

Pihak Lodewyk juga menyerahkan laporan klarifikasi dari Inspektorat BGN sebagai salah satu bukti dalam sidang praperadilan. Menurut OC Kaligis, dokumen tersebut memuat keterangan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan sejumlah pengadaan, antara lain kendaraan bermotor, bangunan, sandal, hingga titik-titik dapur.

Keterangan dari Inspektorat itu dinilai penting oleh kuasa hukum karena Lodewyk sebelumnya telah menjalani pemeriksaan internal. OC Kaligis menyatakan penjelasan yang diberikan Lodewyk dalam pemeriksaan tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan.

“Dia (Pusung) sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat. Hal yang sama juga dia nyatakan. Makanya dia mau muncul di Zoom untuk klarifikasi bahwa perkara ini atas dirinya, dia adalah korban kriminalisasi,” ujar OC Kaligis.

Persoalan pengadaan BGN menjadi

bagian dari penyidikan Kejagung terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam perkembangan perkara pada Juni 2026, Kejagung menyebut adanya dugaan penggelembungan harga pada sejumlah pengadaan, termasuk motor listrik dan sepatu.

Kejagung sebelumnya menyatakan pengadaan tersebut antara lain mencakup 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik menyebut proses pengadaan diduga tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

Dalam perkara tersebut, Lodewyk kini menggunakan mekanisme praperadilan untuk menguji tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik. OC Kaligis menilai apabila keterlibatan kliennya dalam proses pengadaan tidak dapat dibuktikan, maka status hukum yang dikenakan terhadap Lodewyk patut dipersoalkan.

“Jadi kuncinya itu di sana. Nah, kalau ini memang tidak terbukti, mestinya penahanan atas dirinya tidak sah,” kata OC Kaligis.

Permohonan praperadilan itu menjadi perkara kedua yang diajukan Lodewyk setelah permohonan sebelumnya tidak dikabulkan hakim. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Lodewyk kembali mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat untuk menguji tindakan penyidik Kejagung.

Secara historis, praperadilan di Indonesia bukan mekanisme baru. Lembaga tersebut pertama kali diperkenalkan melalui

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai instrumen kontrol pengadilan terhadap tindakan upaya paksa aparat penegak hukum. Perkembangannya kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, antara lain dengan memasukkan pengujian terhadap penetapan tersangka, penggelembungan, dan penyitaan.

Pada 2026, mekanisme tersebut memasuki fase baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru pada 2 Januari 2026. Mahkamah Agung mencatat ketentuan baru tersebut memperluas mekanisme praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum.

Sementara itu, BGN sendiri merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang relatif baru. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 15 Agustus 2024 untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional. BGN kemudian menjadi salah satu institusi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi pemerintah, termasuk program MBG.

Dengan demikian, sidang praperadilan Lodewyk pada Kamis mendatang tidak hanya akan menguji aspek formal tindakan penyitaan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang bagi pihak pemohon untuk menjelaskan konstruksi peran masing-masing pejabat dalam pengadaan BGN. Keterangan Lodewyk serta ahli yang akan dihadirkan menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai oleh hakim. (*)

3,4 Juta Meterai Palsu Disita, Potensi Kerugian Negara Rp1 Triliun



JAKARTA, BP- Sindikat produksi dan peredaran meterai palsu yang beroperasi lintas wilayah dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pengungkapan tersebut mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, sementara potensi penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas jaringan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Besarnya potensi kerugian tersebut berasal dari kapasitas bahan baku yang ditemukan penyidik. Tiga gulung bahan baku yang disita diperkirakan masih dapat digunakan untuk memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai per gulung jika sindikat tidak dihentikan.

Selain bahan baku, aparat mengamankan satu mesin set produksi yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas pembuatan meterai ilegal. Penyitaan itu menjadi bagian penting dalam menghentikan rantai produksi sebelum jaringan tersebut memperluas peredaran produknya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penyidik juga menemukan fakta bahwa sekitar 4 juta keping meterai telah beredar dan terjual. Nilai nominal meterai yang telah dipasarkan tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar.

“Kami juga memperoleh informasi bahwa sekitar 4 juta keping meterai telah terjual dengan nilai nominal sekitar Rp40 miliar,” ujar Bimo.

Pengungkapan jaringan tersebut tidak hanya berlangsung di Ibu Kota. Penindakan dilakukan di sejumlah daerah, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Operasi bersama Polda Metro Jaya dan DJP berlangsung sepanjang Juni hingga awal Juli.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto mengungkapkan perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat serta sejumlah laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya. Informasi tersebut kemudian dikembangkan melalui penyelidikan hingga mengarah kepada jaringan produksi dan distribusi meterai palsu.

“Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah,” kata Dekananto dalam konferensi pers, Rabu (19/6).

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial B, RC, M, TA, RTP, IA, F, H, RH, MIF, SNM, U, FF, NSA, P, dan MO.

Para tersangka tidak menjalankan fungsi yang sama. Penyidik mengidentifikasi adanya pembagian tugas mulai dari pihak yang berperan sebagai produsen, pendaur ulang, kurir, hingga penjual. Pola tersebut menunjukkan adanya rantai kerja dalam proses produksi sampai pemasaran meterai ilegal.

Bimo menjelaskan, selain 3,4 juta keping meterai ilegal, petugas menemukan bahan baku yang masih memiliki kemampuan produksi

dalam jumlah sangat besar. “Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, satu mesin set produksi, dan tiga gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut Bimo, kapasitas bahan baku tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat perkara ini memiliki dampak fiskal besar. “Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun,” sambungnya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa meterai tidak sekadar menjadi perlengkapan administratif pada dokumen. Bea meterai merupakan penerimaan negara yang dikenakan atas dokumen tertentu, sehingga pemalsuan benda meterai sekaligus berpotensi mengganggu kepastian hukum atas dokumen yang menggunakannya.

Secara historis, pengaturan bea meterai di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial melalui Aturan Bea Meterai 1921 atau Zegelverordening 1921. Regulasi tersebut kemudian beberapa kali mengalami perubahan sebelum digantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mulai berlaku pada 1 Januari 1986 dan mengatur pembayaran bea meterai antara lain melalui meterai tempel dan kertas meterai. Regulasi tersebut kemudian dicabut setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Perubahan regulasi tersebut juga menandai perkembangan sistem pembayaran bea meterai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenal meterai tempel, meterai elektronik, serta bentuk meterai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Perkembangan itu mengikuti perubahan pola transaksi dan penggunaan dokumen di tengah digitalisasi ekonomi.

Dalam konteks perkara yang kini dibongkar, keberadaan meterai palsu menjadi persoalan serius karena produk ilegal tersebut dapat beredar melalui jaringan yang melibatkan banyak mata rantai. Semakin besar kapasitas produksi yang tersedia, semakin luas pula potensi distribusi dan penerimaan negara yang dapat tergerus.

Aparat menjerat para tersangka dengan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan/atau Pasal 382 KUHP dan/atau Pasal 383 KUHP. Proses hukum terhadap 16 tersangka selanjutnya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengungkapan tersebut sekaligus menggambarkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran benda meterai, baik secara konvensional maupun dalam ekosistem transaksi yang semakin terdigitalisasi. Dengan dihentikannya jaringan tersebut, potensi produksi puluhan juta keping meterai ilegal yang masih dapat dihasilkan dari bahan baku sitaan tidak berlanjut ke pasar. (*)

Malam Ramah Tamah HUT RI, Walikota Baubau H Yusran Fahim Dorong Sinergi Bangun Baubau Lewat Kerja Nyata



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP - Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pesan itu disampaikan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE saat Malam Ramah Tamah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pantai Kamali, Senin malam (17/8/2026).

Yusran mengatakan, usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Menurut dia, Baubau memiliki potensi besar sebagai pusat maritim, perdagangan, dan kebudayaan sehingga diperlukan sinergi seluruh elemen untuk mengelolanya menjadi kekuatan pembangunan.

"Kota Baubau sebagai pusat maritim, perdagangan dan kebudayaan tentunya membutuhkan sinergitas antara pemerintah dan

masyarakat. Kondisi Kota Baubau harus menjadi perhatian kita bersama dan dijadikan sebagai potensi serta peluang emas untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan sejahtera," ujarnya.

Ia menegaskan, ukuran kemerdekaan di tingkat daerah tidak berhenti pada perayaan dan kegiatan seremonial. Kemerdekaan harus tercermin melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses secara merata hingga wilayah pelosok.

"Harapan kita ke depan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bisa terjangkau oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang berada di kota, tetapi seluruh masyarakat, baik di pelosok-pelosok maupun di wilayah lainnya," katanya.

Menurut Yusran, berbagai kegiatan selama peringatan HUT ke-81 RI, seperti lomba baris-berbaris dan perlombaan lainnya,

merupakan bagian dari upaya menghadirkan semangat kemerdekaan di tengah masyarakat. Malam ramah tamah sekaligus menjadi ruang untuk mensyukuri kemerdekaan dan merefleksikan pembangunan yang telah dikerjakan bersama.

Yusran juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan, khususnya anggota Paskibraka Kota Baubau yang telah menjalankan tugas dengan baik serta peserta marching band yang tampil sejak kegiatan baris-berbaris hingga agenda sore hari. "Selamat kepada Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik dan sukses. Saya juga mengucapkan selamat kepada marching band yang telah tampil mulai dari awal baris-berbaris sampai tadi sore. Mudah-mudahan kita semua senang-tiasa dalam lindungan Allah SWT," tuturnya.

Peringatan kemerdekaan tahun ini memiliki arti historis karena Indonesia

memasuki 81 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi yang dibacakan Soekarno didampingi Mohammad Hatta di Jakarta menjadi tonggak berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka setelah melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme. Secara global, periode pasca-Perang Dunia II juga ditandai gelombang dekolonisasi di berbagai kawasan Asia dan Afrika yang kemudian mengubah peta politik dunia.

Bagi Baubau, Yusran berharap semangat historis tersebut tidak berhenti sebagai ingatan masa lalu, tetapi menjadi energi untuk memperkuat pembangunan masa kini. "Semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui pembangunan yang mampu menghidupkan dan memajukan Kota Baubau. Dan di usia ke-81 tahun, semangat kemerdekaan harus terus kita terjemahkan dalam kerja nyata di Kota Baubau," pungkasnya. (*)

Semarak HUT RI ke-81, Sekretariat DPRD Baubau Perkuat Semangat Nasionalisme, Sekretariat DPRD Baubau Raih Prestasi Antar-OPD



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Sekretariat DPRD Kota Baubau untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus membangun suasana kerja yang positif. Selain menata lingkungan kantor dengan ornamen merah putih, jajaran sekretariat juga aktif mengikuti berbagai perlombaan antarkantor yang digelar Pemerintah Kota Baubau.

Salah satu hasil dari partisipasi tersebut ditorehkan staf Sekretariat DPRD Kota Baubau, Evelia Apriati, yang berhasil meraih juara II lomba menyanyi lagu perjuangan antar-OPD. Prestasi itu menjadi tambahan motivasi bagi jajaran sekretariat untuk terus berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan menyambut kemerdekaan.

Sekretariat DPRD Baubau juga mengikuti sejumlah perlombaan lain, di antaranya bola gotong dan lari karung. Pada saat yang sama, lingkungan kantor ditata dengan berbagai atribut merah putih, seperti balon dan pita, sebagai bagian dari lomba kebersihan dan penataan kantor yang diikuti seluruh OPD di Kota Baubau.

Sekretaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirayahman, menga-

takan rangkaian kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memenangkan perlombaan. Menurut dia, kegiatan peringatan kemerdekaan merupakan sarana menumbuhkan nasionalisme serta membangun semangat positif di lingkungan kerja.

"Harapannya ini bisa menjadi motivasi untuk menanamkan semangat nasionalisme dan tentunya memberikan semangat positif untuk bekerja lebih baik," ujar Yaya saat diwawancarai Baubau Post, Jumat (14/8/2026).

Ia menilai semangat kebersamaan dalam perayaan HUT RI juga relevan dengan tagline "Kerja Bersama" yang digaungkan Pemerintah Kota Baubau. Nilai tersebut diharapkan tidak berhenti dalam kegiatan seremonial, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara historis, peringatan kemerdekaan tahun ini menandai 81 tahun perjalanan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta. Momentum tersebut kemudian menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia, sementara semangat kemerdekaan terus diperingati setiap

tahun sebagai pengingat perjuangan dan persatuan bangsa.

Dalam konteks yang lebih luas, kemerdekaan Indonesia juga menjadi bagian dari gelombang dekolonisasi dunia setelah Perang Dunia II. Dekade 1940-an hingga 1960-an menyaksikan banyak wilayah di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan dan membentuk negara berdaulat. Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang memainkan peran penting dalam perkembangan solidaritas negara-negara baru, termasuk melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.

Yaya berharap kemeriahan HUT RI ke-81 dapat memberikan dampak lebih jauh terhadap kebersamaan dan kinerja aparatur. "Yang paling penting semangatnya. Bagaimana kita bersama-sama membangun suasana kerja yang positif dan tetap membawa semangat kemerdekaan dalam melaksanakan tugas," tandasnya.

Dengan demikian, perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Sekretariat DPRD Baubau tidak hanya diwujudkan melalui dekorasi dan perlombaan, tetapi diarahkan menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan, etos kerja, serta komitmen aparatur dalam menjalankan pelayanan publik. (*)

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serahkan Bantuan untuk Santri Korban Kebakaran Asrama Pesantren Ar-Royan

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau menyalurkan bantuan kepada Pondok Pesantren Ar-Royan di Kecamatan Sorawolio yang terdampak kebakaran. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., bersama Sekretaris Daerah Kota Baubau pada Jumat (14/8/2026), dua hari setelah kebakaran menghancurkan bangunan asrama pesantren.

Penyerahan bantuan dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap dampak dan kebutuhan para korban. Dalam kunjungan itu, Wali Kota bersama rombongan meninjau lokasi kebakaran, menemui pengasuh pondok

pesantren dan para santri, serta memastikan kondisi mereka setelah musibah yang terjadi pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 16.00 Wita tersebut.

Kebakaran menyebabkan 15 santri terdampak. Bangunan asrama semi permanen berukuran 10 x 30 meter atau sekitar 300 meter persegi hangus terbakar. Satu unit mobil yang berada di lokasi juga mengalami kerusakan berat. Berdasarkan pemeriksaan awal di lapangan, api diduga berasal dari korsleting atau arus pendek listrik.

Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban para santri dan pengelola pondok setelah musibah," demikian pokok

bantuan yang disampaikan Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil pendataan kebutuhan di lokasi.

Rombongan pemerintah daerah turut didampingi Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau Dr. Moh. Tasdik, M.Si., Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau Dra. Amalia Abibu, M.Si., Camat Sorawolio, Bhabinkamtibmas, serta personel Polsek setempat. Keterlibatan unsur tersebut menjadi bagian dari penanganan terpadu, mulai dari pendataan warga terdampak hingga pengamanan lokasi kejadian.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau mengingatkan pengelo-

la fasilitas pendidikan, asrama, dan pondok pesantren agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, terutama pada musim kemarau. "Instalasi listrik yang sudah berusia tua perlu diperiksa secara berkala, penggunaan sambungan bertumpuk sebaiknya dihindari, dan alat pemadam api ringan perlu disiapkan pada titik yang mudah dijangkau," ujarnya.

Kebakaran akibat gangguan listrik bukan persoalan yang hanya terjadi di Baubau. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan korsleting listrik berulang kali menjadi dugaan penyebab kebakaran di berbagai daerah. Pada 2026, misalnya, BNPB juga melaporkan ke-



bakaran permukiman di Kabupaten Banjar yang diduga bermula dari korsleting listrik. Secara internasional, data National Fire Protection Association (NFPA) mencatat rata-rata 48.757 kebakaran rumah terkait kegagalan atau gangguan listrik terjadi di Ameri-

ka Serikat pada 2024.

Peristiwa di Ar-Royan menambah rangkaian kejadian kebakaran yang berlangsung di Kota Baubau sepanjang Agustus 2026. BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran terus menyiagakan personel dan peralatan di kawasan rawan

serta melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran dan pohon tumbang melalui kendaraan pengeras suara ke seluruh kecamatan. "Setiap kejadian agar segera dilaporkan kepada BPBD atau instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat," kata Tasdik. (*)